



DIY Larang...

Sejak 11 April lalu, Dishub DIY sudah membangun posko-posko gabungan di wilayah-wilayah perbatasan. Selain di Kecamatan Tempel yang berbatasan langsung dengan wilayah Magelang, posko gabungan juga didirikan di perbatasan Prambanan-Klaten dan perbatasan Wates-Purworejo.

Ketiga posko tersebut merupakan jalur-jalur utama mobilitas orang dan kendaraan antardaerah. Ketiga Posko tersebut akan beroperasi efektif mulai pekan depan. Dishub di kabupaten dan kota juga akan menerapkan pola yang sama khususnya di jalan-jalan kabupaten.

Dishub juga menyiapkan personel untuk menjaga ketiga posko tersebut dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk kepolisian dan TNI. "Kendaraan dari luar daerah [zona merah] kami minta putar balik," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan telah menyiapkan regulasi dalam bidang transportasi untuk mencegah mudik. "Kami sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan

umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah," ujar dia.

Saat ini beberapa wilayah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti wilayah Jabodetabek. Skenario yang disiapkan jika mudik dilarang adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

Skema pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja, sedangkan angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Menurutnya, untuk menegakkan peraturan diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran. Jika nanti pemerintah melarang mudik, tentu perlu ada sanksi bagi yang melanggar.

"Masyarakat yang memaksa untuk mudik harus diberi sanksi. Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik," katanya.

Menurutnya, sanksi tersebut bisa diterapkan mengacu pada UU

No.6/2018 tentang Kekarantina Kesehatan.

Budi menambahkan nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya penyekatan-penyekatan atau *check point* untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek.

Stimulus

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan larangan mudik akan memberikan dampak yang sangat besar. Biasanya, momen mudik dan Lebaran terjadi peredaran uang yang cukup besar, sehingga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat di daerah.

"Ini bisa memperdalam krisis ekonomi jika tidak diimbangi dengan stimulus-stimulus atau kompensasi-kompensasi bagi para pelaku usaha yang sesuai," kata Bhima, Selasa.

Bhima mengatakan pelaku usaha yang sangat terdampak adalah pelaku usaha di sektor UMKM. Biasanya para pengusaha UMKM sudah mempersiapkan dagangan untuk Ramadan dan lebaran ini tiga hingga empat bulan sebelumnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005